SISTEM PEWARISAN DI INDONESIA

Grace Jasmine Sinaga¹, Tamaulina Br. Sembiring²

sinagracejasmine@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²

Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Mengikuti perkembangan zaman pada saat ini, kekayaan adalah salah satu hal yang sering kali membuat perpecahan atau konflik dalam suatu ikatan keluarga maupun kelompok, kekayaan yang dimaksud adalah bukan hanya harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris, namun dapat berupa benda berharga, benda tidak berwujud juga pesan wasiat yang disampaikan oleh pewaris. Dalam hukum, menurut KUHPerdara diatur asas tentang ahli waris yaitu asas pribadi, asas bilateral dan asas penderajatan, dalam KUHPerdara juga dijelaskan unsur-unsur yang termasuk dalam hukum waris, yaitu dalam hukum waris harus ada pewaris, ahli waris, dan juga harta waris sebagai harta yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Hukum mengenai sistem pewarisan ini dibuat untuk mempermudah sebuah keluarga untuk membagikan warisan dan dilihat sah dimata publik, namun perkembangan zaman sekarang masalah pewarisan banyak membuat konflik dalam keluarga maka dari itu pemerintah mengizinkan adanya tuntutan hukum terkait pewarisan ini, agar dalam konflik antar keluarga adanya pihak ketiga sebagai mediasi untuk jalan keluar permasalahan pewarisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan dianalisis dengan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku-buku, majalah hukum, dan bahan pendukung lainnya.

Kata Kunci: KUHPerdara, Hukum Waris, Pewaris, Ahli Waris, Peninggalan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Agama, Adat, dan Kebudayaan, dimana dalam setiap hal dalam kehidupan, tiga unsur ini memiliki peran penting didalamnya sebagai pedoman dan aturan hidup masyarakat Indonesia. Tidak hanya ketiga hal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga Indonesia mempunyai Hukum yang mengatur secara tertulis kehidupan bermasyarakat.

Pada perkembangan zaman sekarang ini ditemukan banyaknya hal yang harus disesuaikan dan diselaraskan antara hukum, agama, adat dan kebudayaan, dimana contoh kecilnya yaitu pewarisan kekayaan seseorang, secara harfiah pewarisan kekayaan biasanya diatur sesuai dengan agama dan adat yang dianut oleh pewaris kekayaan.

Dalam peristiwa hukum waris, akan terjadi ketika meninggalnya seorang pewaris yang berdampak dengan adanya harta kekayaan yang ditinggalkan, dimana penyelesaian hak-hak pewarisan diatur dalam hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang peninggalan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak mewarisi harta benda tersebut.

Kenyataannya hukum waris hingga saat ini di Indonesia sangat beragam, Dimana banyak sistem hukum kewarisan di Indonesia seperti, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tertulis dalam Burgerlijk Wetboek (BW), keberagaman hukum waris semakin terlihat dikarenakan hukum waris adat yang berlaku pada Masyarakat pada kenyataannya tidak hanya bersifat Tunggal, namun juga mengikuti kebiasaan masyarakat dan system kekeluargaan pada masyarakat Indonesia.

Pewarisan dengan sistem kekeluargaan biasa ditemukan pada masyarakat Indonesia yang menggunakan sistem penarikan garis keturunan, pada umumnya dikenal tiga sistem kekeluargaan yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah,

terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali.

2. Sistem Matrilineal

Sistem kekeluargaan dengan garis keturunan dimana menempatkan ibu sebagai penentu garis keturunan keluarga, terdapat di daerah Minangkabau.

3. Sistem Bilateral atau Parental

Masyarakat yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama, terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai fokus kajian dalam artikel ini: Bagaimana sistematika hukum waris di Indonesia dalam pembagian harta warisan kepada anak cucunya?

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari sistematika pewarisan di Indonesia ini adalah metode penelitian empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Waris

Pengertian hukum waris menurut beberapa ahli

Menurut Wirjono Projodikuro, hukum waris adalah tentang apa dan bagaimana hak dan kewajiban kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan berpindah kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut R. Subekti, hukum waris mengatur keadaan tentang benda dan kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dinyatakan, hukum waris itu mengatur sebab-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.

Menurut H.M. Idris Ramulyo, hukum waris ialah kumpulan aturan hukum yang mengatur mengenai siapa ahli waris atau badan hukum yang berhak dan berwenang mewaris harta peninggalan. Dan bagaimana kedudukan setiap ahli waris serta jumlah perolehan masing masing secara adil dan sempurna.

Melihat pendapat para ahli hukum diatas, dapat disimpulkan pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari pewaris baik berupa harta benda yang memiliki nilai berharga dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya yaitu ahli waris, baik secara Undang-Undang maupun melalui surat wasi'at sesuai bagian, yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Unsur Unsur Kewarisan.

Terdapat tiga unsur penting dalam hal kewarisan yaitu:

a. Pewaris (erflater)

Dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis bahwa pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian, namun secara harfiah pewaris bukan sekedar orang yang meninggal dunia saja, tetapi orang yang meninggal dunia dengan adanya bukti akta kematian, dan meninggalkan harta peninggalan. Dalam hukum pewarisan, inti permasalahan terletak pada hak waris bukan terletak pada kewajiban waris, maka dari itu unsur yang penting dalam hukum pewarisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Apabila harta peninggalan tidak ada, artinya orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, maka pewarisan menjadi tidak relevan, sebaliknya apabila ahli waris tidak ada, pewarisan masih relevan, karena harta

peninggalan pewaris akan jatuh kepada negara.

b. Ahli waris (erfgenaam)

Pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, secara umum terdapat dua kelompok yang layak dan berhak menjadi ahli waris. Kelompok pertama adalah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun dari luar kawin dan pasangan kawin (suami / isteri) yang hidup terlama dengan pewaris seperti yang ditertulis pada Pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kelompok kedua adalah orang-orang yang ditunjuk langsung oleh pewaris dalam surat wasiatnya (testament) ketika pewaris masih hidup, bisa mereka yang merupakan keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris baik sah maupun luar kawin, atau pasangan kawin (suami / isteri) pewaris yang hidup terlama dengan pewaris, atau bisa juga orang lain, dan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris, hak dan kewajiban tersebut timbulnya setelah pewaris meninggal dunia seperti yang ditertulis dalam Pasal 954 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Ahli waris adalah orang yang berwenang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum perihal harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum

c. Harta peninggalan (boedel).

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diberikan kepada mereka yang berhak mewarisinya. Pada dasarnya tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis akan bisa dibagikan kepada orang yang berhak mewarisinya, karena harus ditinjau terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan pewaris tersebut harta campur atau bukan.

Jika harta yang ditinggalkan pewaris tersebut adalah harta campur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata, harta campur perkawinan tersebut pertama sekali harus dibagi dalam dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan adalah untuk pasangan kawin (suami/isteri) pewaris, setengah bagian lagi adalah harta peninggalan pewaris untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Jika tidak terjadi harta campur, dimana sebelum perkawinan, pewaris dengan pasangan kawin (suami/isteri) pewaris tidak dibuat perjanjian kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka harta tetap dibawah penguasaan oleh masing masing pihak, tidak dapat dibagi dua.

3. Pengaturan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdata

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersamaan dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik, sebenarnya hal dapat menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah pada pewarisan bukan hanya hak milik saja, namun juga hak-hak kebendaan lainnya (hak kekayaan) dan di samping itu juga ada kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.

Di dalam Pasal 584 KUHPerdata meniru Pasal 711 Code Civil ditetapkan bahwa: "Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat"

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata mengandung makna bahwa pewarisan adalah salah satu cara yang secara limitatif dapat ditentukan untuk memperoleh suatu hak milik,

dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda, yang adalah benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersamasama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Disamping itu penyebutan dalam hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdara adalah tidak benar. Untuk jelasnya pada Pasal 528 KUHPerdara menyebutkan: “Atas sesuatu kebendaan (zaak), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik”

Dari hal ini, hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris “merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah zaak (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (zakelijkrecht) atasnya.

3. Bagian Mutlak Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan

Bagian mutlak, yaitu bagian yang dari harta peninggalan pewaris dimana selanjutnya diserahkan kepada ahli waris menurut keturunan garis lurus sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang. Bagian mutlak terdapat dalam Pasal 914 KUHPerdara dimana menetapkan bagian mutlak yang akan diterima ahli waris, adalah:

1. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak yang sah maka bagian mutlak adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang harus di terima.
2. Apabila pewaris meninggalkan dua orang anak maka bagian mutlak yang diterima adalah $\frac{2}{3}$ dari apa yang harus diterima.
3. Apabila pewaris meninggalkan tiga orang anak atau lebih maka bagian mutlak yang diterima yaitu $\frac{3}{4}$ bagian yang harus mereka terima berdasarkan undang-undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa warisan adalah harta kepemilikan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris setelah meninggal dunia, dan diberikan kepada ahli warisnya. Hukum pewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dimana besaran bagian mutlak yang akan diterima oleh ahli waris sudah ditentukan secara hukum, namun dalam realitanya sering pembagian warisan sesuai dengan adat dan agama yang dianut oleh masyarakat, hal ini tetap sah dimata hukum, namun perlu digaris bawahi bahwa pembagian harta peninggalan warisan harus disepakati dan disetujui oleh semua pihak terkait, agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan antara keluarga yang mengakibatkan adanya konflik yang terjadi, maka dari itu pentingnya pemahaman mengenai pembagian harta warisan oleh semua lapisan masyarakat agar meminimalisir terjadinya persengketaan dan pemberian hak yang adil dan sesuai hukum yang berlaku, agar terciptanya masyarakat yang harmonis dan sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Kansil, 2006:143

HM Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek] (Jakarta Sinar Grafika 1993). hlm. 13-14.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

M.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta; sinar grafika, 1995), h.93

R Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI, (Jakarta Intermedia 1985) hlm.17.

Wirjono Projodikuro Hukum Warisan Di Indonesia (Bandung IS Gravennage Vorking van Hove 1962) hlm. 8.